

CRITICAL MASS, POLITIK ISLAM DALAM MENGHADAPI KOMUNITAS KERJASAMA ASEAN 2015

Oleh : *Dr. Zulfikri Suleman, M.A.*

A. Pendahuluan

Pada tanggal 9 November 2010 yang lalu, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, mengadakan seminar setengah hari dengan topik "Kerjasama Lingkungan Hidup ASEAN". Tujuan umum seminar tersebut adalah untuk mensosialisasikan aspek-aspek kerjasama di antara negara-negara ASEAN di bidang lingkungan hidup khususnya dan dalam rangka kerjasama komunitas ASEAN 2015 pada umumnya. Dalam seminar tersebut, penulis mempresentasikan makalah yang berjudul "Partisipasi Daerah dan Masyarakat Sipil di Sumatera Selatan dalam Komunitas Kerjasama ASEAN 2015". Pemahaman atas topik ini telah menyadarkan penulis tentang jauhnya jarak antara kemajuan yang telah dicapai ASEAN dengan pemahaman masyarakat tentang hal itu. Untuk diketahui, ASEAN sekarang ini telah memiliki 'konstitusi' bersama (Piagam ASEAN) yang akan mendasari pembentukan komunitas bersama di bidang politik dan pertahanan; ekonomi; dan sosial-budaya pada tahun 2015 nanti. Menurut Direktur Kerjasama Fungsional ASEAN yang berbicara dalam seminar tersebut, kerangka kerjasama dalam lima tahun ke depan akan mencakup 350 item kegiatan yang harus disepakati oleh kesepuluh Negara anggota ASEAN.

Di lain pihak, masyarakat kita masih berkuat dengan kegiatan-kegiatan keseharian mereka, yang sebagian di antaranya masih diwarnai oleh upaya keras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang lebih layak. Usaha-usaha tersebut terasa semakin berat. Di samping

0	8	0	2	0	8	0	1	1	1	0	2	0	2	3	2	2
Kode Fakultas	Kode PS/Bagian	Kode Publikasi	Kode Penulis	Tahun Publikasi	Kode Sumber Tulsian	Nomor urut Publikasi dan Fakultas										

situasi politik nasional yang tidak kondusif (pertikaian elit politik demi kekuasaan politik semata-mata dan korupsi di jajaran birokrasi), akibat-akibat negatif dari fenomena globalisasi, khususnya perjanjian perdagangan bebas yang mengikat negara kita, semakin menjauhkan masyarakat dari usaha untuk memahami dengan cerdas hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang mempengaruhi kepentingan hidup mereka sehari-hari. Ini adalah pertanda ketidaktahuan dan ketidakpedulian yang, apabila tidak segera ditanggapi segera dan secara memadai, akan semakin menyulitkan kehidupan bangsa di masa depan.

Makalah ini merupakan bagian kecil, sederhana dan praktis dari usaha menyadarkan masyarakat kita tentang komunitas kerjasama ASEAN dengan segala aspek dan implikasinya. Dengan kesadaran bahwa akibat negatif dari kegagalan usaha tersebut akan merugikan kehidupan umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, penulis mencoba menawarkan jalan keluar dalam bentuk konsep *critical mass* atau komunitas inti dalam masyarakat, yaitu pembentukan kelompok-kelompok sukarelawan yang terdidik, mandiri dan mengabdikan kepada masyarakat secara berkesinambungan semata-mata berdasarkan keyakinan bahwa ajaran Islam mengamanatkan kepada kita untuk saling mengingatkan dan berlomba-lomba mengusahakan kebaikan dalam kehidupan ini.

B. Indonesia dan ASEAN

Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN, bahkan salah satu negara pendiri asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara ini pada tahun 1967. Indonesia juga merupakan negara anggota ASEAN yang terbesar dilihat dari jumlah penduduk dan keluasan wilayahnya, yang dengan demikian tentu juga berarti kekayaan sumberdaya alamnya. Secara demikian, Indonesia seyogyanya juga memainkan peranan yang menentukan dalam kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN mau pun kerjasama antara ASEAN dengan negara-negara lain. Usaha untuk mewujudkan komunitas kerjasama ASEAN 2015 akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin kita dan bangsa Indonesia pada umumnya, yang akan membuktikan apakah negara kita akan tetap

menjadi negara anggota ASEAN yang utama dan semakin maju atau, sebaliknya, hanya menjadi negara besar yang terus berlutut dengan keterbelakangannya.

1. Komunitas Kerjasama ASEAN 2015

Barangkali tidak banyak yang menyadari bahwa sepuluh negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) akan menjadi satu komunitas pada tahun 2015 nanti. Dengan semboyan "satu visi, satu identitas dan satu komunitas", negara-negara anggota ASEAN mengikatkan diri dalam perjanjian untuk menjadi satu komunitas kerjasama di bidang politik dan pertahanan, ekonomi; dan sosial-budaya. Tujuan umumnya adalah untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang terintegrasi, stabil, damai, sejahtera terbuka dan saling peduli. Dilihat dari visi dan tujuan umum ini, kita bisa berharap bahwa bangsa Indonesia akan menikmati kehidupan yang aman dan nyaman di masa depan.

Visi besar ASEAN di atas disepakati dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Selanjutnya, dalam usaha merealisasikan visi besar tersebut, KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 mengesahkan *Bali Concord II*, yang menyepakati pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Komunitas ASEAN berpijak pada tiga pilar kerjasama Komunitas Politik dan Pertahanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*, APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*, AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*, ASCC). Dalam KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos, tahun 2004, kerangka kerjasama ASEAN ini dikonkritkan dalam bentuk persetujuan terhadap Rencana Aksi (*Plan of Action*) untuk masing-masing pilar kerjasama ini. Langkah lebih maju disepakati dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, bulan Januari 2007, yaitu percepatan pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015. Selanjutnya adalah penandatanganan Piagam ASEAN dalam KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada bulan November 2007 dan pemberlakuannya pada tanggal 15 Desember 2008. Dengan penandatanganan Piagam ASEAN ini, ASEAN menjelma

menjadi asosiasi berdasarkan hukum (*rule-based organization*) sekaligus menjadi subyek hukum (*legal personality*).

Kita tidak mungkin menguraikan setiap aspek dari komunitas kerjasama ASEAN ini. Cukup dikemukakan di sini, untuk memudahkan merealisasikan komunitas kerjasama ASEAN ini, disusun cetak biru (*blue print*) dari masing-masing pilar kerjasama tersebut. Cetak biru kerjasama ekonomi disahkan (mencakup 14 forum atau bidang kerjasama) dalam KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007, sedangkan cetak biru kerjasama politik-keamanan (mencakup enam forum atau bidang kerjasama) dan cetak biru kerjasama sosial-budaya (mencakup 16 forum atau bidang kerjasama) disahkan dalam KTT ASEAN ke-14 di Cham Am Hua Hin, Thailand. KTT ke-14 ini juga mengesahkan deklarasi mengenai peta jalan (*road map*) Pembentukan Komunitas ASEAN 2009-2011. Secara keseluruhan, dalam rangka mewujudkan komunitas kerjasama ASEAN 2015, akan terdapat 350 item kegiatan yang harus diselesaikan oleh negara-negara anggota ASEAN. Ini menunjukkan bahwa ASEAN dewasa ini sudah menjelma menjadi organisasi kerjasama yang teknis, komprehensif, maju dan rumit. Keputusan politik pemerintah untuk mengikat diri ke dalam organisasi kerjasama ASEAN seperti ini tidak lain daripada kewajiban bagi kita untuk memahami secara terus-menerus setiap aspek kerjasama ini. Tidak berlebihan apabila dikemukakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang melalui komunitas kerjasama ASEAN 2015 ini akan amat bergantung pada seberapa jauh masyarakat Indonesia memahami semua aspek kerjasama tersebut sekaligus memetik manfaat darinya.

2. Perjanjian Perdagangan Bebas

Salah satu kecenderungan dalam kehidupan ekonomi internasional dewasa ini adalah perjanjian perdagangan bebas (*free trade*), yaitu kesepakatan tentang liberalisasi perdagangan antara suatu negara dengan negara lain, antara satu negara dengan kelompok negara lain atau antar kelompok negara. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa perdagangan bebas berarti aliran masuk barang dan jasa tanpa tarif atau bea masuk di antara negara-negara yang mengikat diri pada perjanjian perdagangan bebas tersebut. Sejauh ini kita mengenal perjanjian AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), yaitu perjanjian perdagangan

bebas intra ASEAN secara bertahap yang ditandatangani pada tahun 1992. Berdasarkan perjanjian tersebut, enam negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam) mengikat diri pada penghapusan tarif untuk semua produk dalam *inclusion list* (IL) mulai tahun 2010 (untuk empat negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam, ketentuan yang sama mulai berlaku tahun 2015). Contoh lain adalah ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) yang ditandatangani bulan November 2002 antara negara-negara ASEAN dengan RRC dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Ini berarti bahwa barang-barang dan jasa dari RRC yang tercakup dalam perjanjian tersebut bebas masuk ke negara-negara ASEAN dan dijual bersaing dengan barang-barang dan jasa lokal. Sebaliknya, barang-barang dan jasa dari negara-negara ASEAN juga bebas masuk ke RRC dan dijual ke rakyat RRC bersaing dengan produk mereka sendiri.

Tujuan umum liberalisasi perdagangan ini adalah untuk mengintegrasikan kemajuan ekonomi negara-negara. Melalui perjanjian perdagangan bebas ini, negara-negara yang mengikat diri ke dalamnya akan memperoleh kemudahan akses, terutama dalam arti akses pasar untuk produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak mengikat diri ke dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk barang dan jasanya di negara lain tersebut. Kalau pun dibolehkan dipasarkan di negara lain tersebut, barang yang dipasarkan tersebut akan dikenai bea masuk yang tinggi oleh negara penerima, yang berakibat pada harga jual yang tinggi pula sehingga akan sulit bersaing dengan barang dan jasa dari negara-negara lain yang dipasarkan melalui perjanjian perdagangan bebas (bea masuk nol persen). Dengan demikian, perjanjian perdagangan bebas merupakan sarana bagi suatu negara untuk memasarkan barang dan jasanya dengan murah dan pasti, yang dengan demikian menjamin kepastian kesinambungan produksinya sepanjang pasokan bahan mentah tidak lagi jadi persoalan.

Meskipun perjanjian perdagangan bebas memudahkan suatu negara peserta dalam memasarkan produk barang dan jasanya,

yaitu mencapai kemajuan ekonomi secara bersama-sama, dalam kenyataannya, prosesnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Salah satu implikasi utama dari perjanjian perdagangan bebas ini adalah persaingan yang amat tajam di antara negara-negara yang memasarkan barang dan jasa yang sama. Apabila persaingan merupakan mekanisme satu-satunya dalam memasarkan barang dan jasa, maka satu-satunya ukuran dari barang dan jasa yang *marketable* adalah murah tapi berkualitas. Selanjutnya, suatu barang dan jasa yang berkualitas tapi murah hanya bisa dihasilkan melalui proses produksi yang efisien dan oleh sumberdaya manusia yang berpengetahuan dan trampil serta teknologi yang maju pula. Menjadi jelas bahwa memajukan ekonomi dan perdagangan dalam era perdagangan bebas dewasa ini bukan merupakan usaha yang sederhana dan *instant*, melainkan merupakan usaha yang amat sulit karena melibatkan banyak aspek, yang semuanya berhulu pada kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Tidak bisa dibantah, makin maju kualitas sumberdaya manusia suatu negara, makin unggul negara tersebut dalam kancah perdagangan antar negara. Itulah sebabnya porsi perdagangan dunia dewasa ini masih didominasi oleh negara-negara maju yang memiliki keunggulan dalam semua hal. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana posisi Indonesia dalam peta persaingan perdagangan internasional yang amat kompetitif dewasa ini.

3. Apakah Rakyat Indonesia Sudah Siap?

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, hubungan antar negara adalah arena pertarungan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Meskipun negara-negara juga memiliki kepentingan yang sama, misalnya menciptakan stabilitas politik dan keamanan sekawasan, pada hakikatnya, kepentingan nasional merupakan pertimbangan utama bagi suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang seringkali menunjukkan 'kemurahan' hatinya dengan memberikan bermacam-macam bantuan kepada Indonesia. Yang terjadi sebenarnya bukanlah kebaikan yang tulus, melainkan kedua negara maju tersebut menjadikan bantuan mereka itu sebagai pengikat agar Indonesia tetap berada di bawah pengaruh mereka demi kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Hal

yang sama juga berlaku ketika Indonesia berhubungan dengan negara-negara lain, misalnya dengan Singapura dan RRC. Dengan kata lain, kepentingan nasional yang berbeda-beda merupakan motor penggerak yang mewarnai secara jelas hubungan antar negara sejak dahulu sampai sekarang ini.

Sudah jelas, semua negara berkepentingan agar dunia ini merupakan tempat yang aman dan damai di mana negara-negara dapat membina kerjasama untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam kenyataannya, dengan alasan yang bermacam-macam, dan sampai tahun 1970an, kita senantiasa menyaksikan sengketa, konflik dan peperangan di berbagai bagian dunia. Konflik bersenjata sejak tiga dasawarsa belakangan ini memang sudah amat berkurang, kecuali di beberapa kawasan saja. Tapi kecenderungan positif ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa dunia sekarang ini tetap mengandung potensi untuk terjadinya sengketa dan konflik di antara negara-negara. Hal ini disebabkan antara lain oleh dua kecenderungan. Pertama, kecenderungan globalisasi dewasa ini mengharuskan suatu negara untuk berhubungan dengan negara-negara lain, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Adalah jauh lebih mudah bagi kita untuk menyebutkan beberapa saja negara yang dianggap tertutup (Korea Utara dan Kuba) dibandingkan dengan negara-negara yang melibatkan diri dalam arus kerjasama internasional, sebagaimana terlihat dari keanggotaan dalam WTO (World Trade Organization). Kedua, di lain pihak, negara-negara memasuki arena hubungan dan kerjasama ini dengan titik berangkat yang berbeda-beda, ada yang sudah maju tapi ada juga yang belum maju, bahkan masih terkebelakang (*backward*). Negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Singapura adalah negara-negara yang sudah amat maju (*developed countries*) sehingga lebih siap dalam memasuki arena hubungan dan kerjasama internasional. Sebaliknya, negara-negara di Afrika dan Asia (negara-negara berkembang, *developing countries*), termasuk Indonesia, masih berkutat dengan usaha untuk meletakkan landasan bagi pembangunan nasionalnya (menghapus kemiskinan, pemberantasan buta huruf dan mengurangi pengangguran). Dalam kondisi demikian, terjadinya pergesekan dan sengketa kepentingan di antara negara-negara tentu merupakan hal yang sudah dengan sendirinya dan tidak bisa dihindari.

D. Kesimpulan

Negara kita, khususnya umat Islam, sedang berada dalam medan pertarungan untuk mempertahankan eksistensi dan kesinambungan pembangunannya, berhadapan dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju. Pertarungan ini bersifat kompetitif, dan kadang-kadang menimbulkan konflik, karena hubungan antar bangsa memang sarat dengan usaha dan persaingan untuk mewujudkan kepentingan nasional masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia tidak cukup mengandalkan usaha dari pemerintah semata-mata, melainkan diperlukan terobosan-terobosan dari segenap komponen bangsa. Yang dimaksud adalah inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat untuk menemukan jalan pintas atau cara dan strategi dalam menghadapi implikasi negatif dari kerjasama internasional yang tidak bisa dihindari dan, kalau bisa, menemukan cara dan strategi untuk mendorong kemajuan masyarakat di segala aspeknya,

Perwujudan komunitas kerjasama ASEAN 2015 dan perjanjian perdagangan bebas intra ASEAN dan antara ASEAN dengan negara-negara lain adalah tantangan konkrit yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sejak sekarang. Masa depan kesinambungan pembangunan nasional kita amat tergantung pada seberapa jauh kita memahami komunitas kerjasama ASEAN 2015 dengan segala aspeknya ini. Oleh sebab itu, diperlukan usaha keras bukan saja oleh pemerintah tapi juga oleh segenap komponen bangsa, khususnya komunitas Islam, dalam mengantisipasi implikasi negatif mau pun peluang untuk maju dari komunitas kerjasama ASEAN 2015 ini.

Sehubungan dengan itu, pembentukan *critical mass* dalam masyarakat adalah salah satu jawaban yang konkrit dan praktis. Para sukarelawan yang terdidik diharapkan membentuk komunitas-komunitas inti dalam masyarakat yang akan memelopori kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa dan dosen dari jurusan ilmu politik (jurusan siyasah di IAIN) dan jurusan hukum internasional berkumpul, belajar dan berdiskusi mengenai komunitas kerjasama ASEAN 2015 dengan segala aspeknya. Hasil diskusi tersebut disebarluaskan ke masyarakat (dalam bentuk tulisan di koran atau selebaran) atau diserahkan kepada pemerintah

daerah dan DPRD dalam bentuk rekomendasi. Beberapa komunitas inti yang lain bekerja bersama masyarakat dalam mengembangkan berbagai sektor kehidupan seperti pertanian organik, peternakan, sayuran hidroponik, perkebunan, koperasi dan lain-lain semacam itu, yang tujuan umumnya adalah untuk mengembangkan dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan. Kegiatan komunitas inti ini harus bersifat mandiri dan berkesinambungan, yang mencerminkan pengabdian penuh pada kehidupan masyarakat.

Disadari bahwa ini merupakan tugas yang amat berat, terutama dalam berhadapan dengan kecenderungan kehidupan masyarakat yang individualistis dan pragmatis seperti dewasa ini. Tapi bagi generasi muda yang akan jadi pemimpin di masa depan, serta dengan kesadaran bahwa mengabdikan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah yang mulia, ini sekaligus menjadi peluang bagi mereka untuk membuktikan kepantasan mereka untuk tampil sebagai pemimpin-pemimpin di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, Ahmad, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Pustaka Hidaya, Bandung, 1999.
- Dewan Redaksi Prisma, Iman, Amal dan Pembangunan: Sebuah Memorandum Pengantar, *PRISMA* 4, Agustus 1975, hal. 3-8.
- Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *ASEAN Selayang Pandang*, edisi ke-19, 2010.
- Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Piagam ASEAN (ASEAN Charter)*, tanpa tahun.
- Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya (Socio-Cultural Community Blueprint) ASEAN*, 2010.
- Marwa, Taufik, "Hadapi FTA ASEAN-Cina: Butuh Political Will Mengurangi EBT", *Sriwijaya Post*, 6 Januari 2010, hal. 2.
- Rosecrance, Richard, *Kebangkitan Negara Dagang: Perdagangan dan Penaklukan di Dunia Modern*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Syamsurijal. H., "Berdaganglah Sampai ke China", *Sriwijaya Post*, 11 Januari 2010, hal. 8.